

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A .Tinjauan Umum penyidik dan penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuaidengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”¹.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.²

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.³

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut : ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, Berita acara, penyitaan, penyimpangan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHP telah memberikan batasan pada pasal 1 angka 1 KUHP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah : (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan mengenai organisasi

² Mahrizal Afriado, 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum.

³ Mukhils R. 2010. *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1.

dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”⁴

Penulis berpandangan maksud dan tujuan adanya pembatasan terhadap lembaga negara yang berperan dalam penyidikan, agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya, sehingga proses pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai kompetensi lembaga yang dimaksud dalam hal ini kepolisian bersama dengan pejabat pegawai negeri sipil, sehingga nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan.

Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh dibawah ini berdasarkan literatur yang dihimpun penulis:

- a Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum.

Dalam KUHAP pasal 6 ayat (1), penyidik adalah sebagai berikut :

- ***Pejabat Polisi Republik Indonesia.***
- ***Pejabat Pegawai Negeri Sipil*** tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian (pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum,

⁴ KUHAP, *Op, Cit*

sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik polri. Selain itu, nila PPNS akan menahan harus ada rekomendasi dari penyidik polri.

b Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara :

- Korupsi;
- Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

c Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.⁵

Sedangkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal penjelasan pasal 6 ayat 2 mengenai syarat kepangkatan penyidik sebagai berikut :⁶

a. **Pejabat Penyidik Polri**

pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) **Pejabat Penyidik Penuh** Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan,yaitu:

⁵ Monang Siahaan.2017.*Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*.Jakarta.Grasindo.Hal.10

⁶ Lihat Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi;
- b atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
- c ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia

(2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁷

- a sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
- b atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan ii/a);
- c diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah

⁷ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁸ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Dengan adanya kualifikasi penyidik sebagaimana dimaksud diatas menunjukkan keseriusan dalam memilih dan memilih satuan kepolisian yang memiliki kompetensi dalam proses penyidikan, hal tersebut dimaksudkan agar penyidik dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang membatasi tugas dan kewenangan penyidik.

2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga

⁸ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111-112.

yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),

8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),

16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP),⁹

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang

untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

⁹ Lihat Ketentuan Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Atau sering di sebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang :¹⁰

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.¹¹

Penulis berpendapat dengan adanya tugas dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.

3. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi,

¹⁰ Darwan Prinst.2000. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Djambatan. Jakarta.hlm. 92-93.

¹¹ Lihat Ketentuan KUHAP

sekali pun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹²

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi

¹² M Yahya Harahap, Op.Cit. hlm. 134

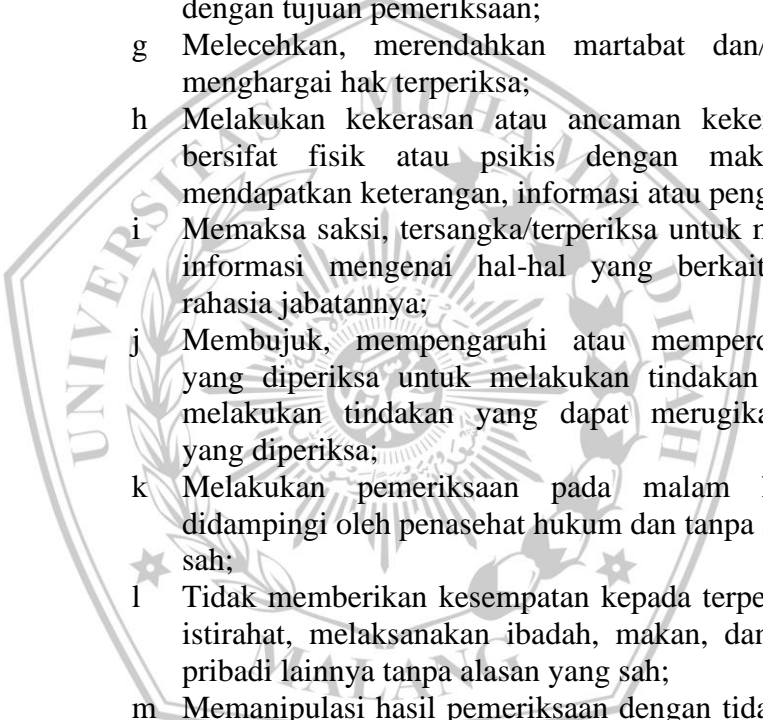
manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Manipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;¹³

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan juga tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiiksa, petugas dilarang :

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

- 
- a Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
 - b Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
 - c Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
 - d Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
 - e Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
 - f Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
 - g Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
 - h Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
 - i Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
 - j Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
 - k Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
 - l Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
 - m Manipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
 - n Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
 - o Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
 - p Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
 - q Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

r Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, diperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.¹⁴

Penulis berpandangan dengan adanya prinsip Hak Asasi Manusia yang diakui sebagai hak dasar alami manusia. Maka penyidik dalam menjalankan proses penyidikan dapat bersikap secara manusiawi dan penyidik harus bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, kesusilaan yang merupakan hak mendasar bagi setiap warganegara. Sehingga dapat tercapainya proses penyidikan yang berdasarkan Hak Asasi Manusia.

B. Tinjauan pengawasan penyidikan

1. Pengawasan

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan di Indonesia merupakan terjemahan dan sinonim dari istilah “control” atau penulis sebut sebagai proses penilaian atas suatu perencanaan dalam hal tertentu untuk mencapai suatu tujuan sehingga dapat menilai suatu keberhasilan dari proses yang hendak dicapai.

George R.Terry dalam mendefinisikan istilah “control” mengemukakan pengawasan adalah menentukan yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.¹⁵ Sedangkan Henry Fayol mengemukakan “kontrol adalah penelitian apakah segala sesuatu

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Menurut George R.Terry, seperti Yang dikutip Oleh/Sadjijono.2010.*Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta.PRESSindo. Hal.155

dilakukan sesuai dengan rencana, perintah-perintah dan prinsip yang telah ditetapkan.¹⁶

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa pengawasan mengandung sesuatu perhatian atas kegiatan yang dilakukan, agar tetap berada pada batas-batas wewenang, tanggung jawab dan norma-norma mengikat, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi efektif dan tidak terjadi penyimpangan dan atau kesalahan yang dapat membuat hal yang dilakukan menjadi salah.

2. jenis-jenis pengawasan

Pengawasan dapat dibagi dalam beberapa jenis, dan pembagian tersebut bertujuan untuk dapat diketahuina proses yang efektif dalam melakukan pengawasan :

- a. Berdasarkan subjek dan lingkungan pengawasan yang meliputi:
 1. Pengawasan ekstern, pengawasan ini dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang berada di luar organisasi yang di awasi.
 2. Pengawasan Intern, pengawasan ini dilakukan oleh unit organisasi yang diawasi.
- b. Berdasarkan tempat pengawasan :
 1. Pengawasan dari jauh (*Sur Piece*), pengawasan ini sifatnya tidak langsung, pengawasan ini dilakukan melalui dokumen/laporan yang diterima.

¹⁶ Menurut Henry fayol, seperti Yang dikutip Oleh/Sadjijono.2010.*Memahami Hukum Kepolisian*.Yogyakarta.PRESSindo. Hal.155

2. Pengawasan dari dekat (Sun Piece), pengawasan ini dapat langsung dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan/instansi atau pribadi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan.

c. Berdasarkan waktu, Pengawasan ini terdiri :

1. Pengawasan preventif, pengawasan ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebelum pekerjaan ini dilakukan.
2. Pengawasan refrensif, pengawasan ini dilakukan setelah pekerjaan selesai dilakukan untuk membandingkan hasil pekerjaan yang diperoleh dengan perencanaan yang dibuat.¹⁷

Dengan mengetahui beberapa bentuk dan jenis pengawasan diatas, penulis berpendapat bahwa efektifnya proses pengawasan tidak terlepas dari segala faktor pendukung, baik dari sumber daya manusia yang melakukan pengawasan hingga metode yang di gunakan dalam proses pengawasan.

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan instrumen yang paling penting dalam fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dalam setiap opsional organisasi di mana pengawasan sebagai alat untuk menjamin terwujudnya perencanaan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan merupakan tahap dari sistem manajerial yang menjaga agar organisasi tetap berada dalam batasbatas yang diizinkan, dengan rencana

¹⁷ Departemen Dalam Negeri, *Cost Accounting Planning and Control. Edisi Kedelapan*. Terjemahan Alfonso Sirait dan Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga, 1997, hlm. 86. Dalam jurnal hukum. Baihaqi. *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan*. Vol.8.Banda Aceh. 2016

menyediakan kerangka kerja untuk tahap pengawasan dan proses manajerial. Pengawasan terkait dengan fungsi perencanaan. Suatu pengawasan yang baik tidak akan terlaksana tanpa adanya rencana dan petunjuk pelaksanaan yang telah dibuat.

”Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendisain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang ada dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.”¹⁸

4. Pengawasan penyidikan

Pada dasarnya pengawasan penyidikan diharapkan mampu menjawab persoalan penyidikan yang kerap kali menyalahi wewenang sebagai penyidik dan juga kerap melanggar hak-hak orang yang diduga melakukan tindak pidana. hal tersebut juga telah dijelaskan dalam konsideran Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana poin b. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan; Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka,

¹⁸ *Ibid.*

diharapkan bahwa penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri tidak akan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus.

Jaminan atas kondisi diatas dirasa perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi kontrol bagi penyidik. Dalam hal ini dituangkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang memuat salah satu unsurnya yaitu Pengawasan. Pengertian pengawasan penyidikan menurut Peraturan kepala badan Reserse Kriminal Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Standar operasional prosedur Pengawasan penyidikan tindak pidana adalah “serangkaian kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilakukan terhadap petugas penyelidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan penyidikan”.¹⁹

1. Struktur

Pengawasan Penyidikan tindak pidana meliputi:

- a. atasan penyidik; dan
- b. pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan.

Atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

¹⁹ *ibid*

a. Tingkat Mabes Polri;

1). Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:

- a) Kapolri;
- b) Kabareskrim Polri;
- c) Direktur pada Bareskrim Polri;
- d) Kasubdit pada Dit Bareskrim Polri; dan
- e) Kanit pada Subdit Bareskrim Polri.

2). Pejabat non struktural yang diberikan tugas khusus mengkoordinir penyidikan.

b. Tingkat Polda:

1. Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:

- a) Kapolda;
- b) Dirreskrimum, Dirreskrimsus, dan Dirresnarkoba;
- c) Kasubdit pada Ditreskrimum, Ditreskrimsus, dan Ditresnarkoba

2. Pejabat non struktural yang diberikan tugas khusus mengkoordinir penyidikan.

c. tingkat Polres;

1. Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:

- a) Kapolres;

- b) Kasatreskrim, Kasatresnarkoba; dan
 - c) Kapolsek.
2. Pejabat non struktural yang diberikan tugas khusus mengkoordinir penyidikan

Pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan kepala badan Reserse Kriminal Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Standar operasional prosedur Pengawasan huruf b, meliputi:

a. Tingkat Mabes Polri:

- 1. Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri; dan
- 2. Pengawas Penyidikan pada Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri sesuai surat perintah tugas.

b. Tingkat Polda:

- 1. Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba; dan
- 2. Pengawasan Penyidikan pada Bag Pengawasan Penyidikan Polda sesuai surat perintah tugas.

c. Tingkat Polres:

- 1. Kaurbinops (KBO) Satreskrim dan Satresnarkoba; dan

2. Pengawas Penyidikan pada Urbinops Satreskrim dan Satresnarkoba sesuai surat perintah tugas²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui secara jelas, bahwa berjalannya proses pengawasan penyidikan dilakukan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan dapat disimpulkan jika pengawasan penyidikan dilakukan oleh internal kepolisian pada satuan tugas tertentu dengan tingkatan-tingkatan pada wilayah hukumnya.

C. Tinjauan Umum efektivitas Hukum

a) Pengertian efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang telah mengintervensi ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan.²¹ Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna. Sedangkan, efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan guna hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.

²⁰ Syahril. 2017. *Peranan Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Dalam Penanganan Tindak Pidana Khusus Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Skripsi. Makassar.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Di Akses Pada tanggal 24 Maret 2019

b). Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto tentang efektifitas hukum adalah hukum yang dijalankan di masyarakat berdasarkan aturan yang sudah ada. Tujuannya supaya proses penyelesaian hukum betul-betul efektif sesuai apa yang diharapkan oleh peraturan.²²

Soerjono Soekanto menyatakan ada lima factor efektifnya dan tidaknya suatu hukum sebagai berikut:²³

1. Faktor Hukumnya Sendiri.

Hukum yang dibuat harus ada kepastian hukum dalam penerapannya. Jika hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Maka bisa dipastikan hukum berjalan tidak efektif, dikarenakan tidak mendatangkan keadilan bagi masyarakat yang berhadapan dengan Hukum. Dengan demikian hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain dalam penegakannya. Tentu semua orang mengharapkan hukum bisa menyelesaikan pertentangan yang lahir di masyarakat seperti apapun bentuk masalahnya.²⁴

²² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988), Hal 80, Dalam Tesis Hukum, fauzul Qabir Abdul Kadir, 2018, *Efektivitas Upah Minimum Kabupaten Malang (Studi Pengawasan Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017 Di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Malang)*, Program Studi Magister Ilmu Hukum UMM 2018, Hal. 13.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008). Hal. 8.

²⁴ *ibid*

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum yang dibutuhkan mentalitas seseorang yang memiliki perilaku yang baik dan taat pada aturan hukum yang ada. Jika penegak hukum taat aturan tentu berjalannya hukum di masyarakat tidak menjadi masalah. Maka yang menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum harus berbuat jujur. Agar di masyarakat merasakan kebenaran dan keadilan terhadap persoalan hukum yang dialami. Hal yang lain penegak hukum dilarang penyalagunaan kewenangan dalam menjalankan tugas penyidikan. Jika hal ini salah gunakan dampaknya buruk terhadap penegak hukum.²⁵

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Berjalannya fungsi penegakan hukum harus di dukung seperti sarana prasarana yang memadai diantaranya transportasi, alat-alat komunikasi, alat kantor, sumber daya manusia dan keuangan. Jika tidak didukung oleh fasilitas yang mendukung akan menjadi tidak efektifnya penegakan hukum.²⁶

4. Faktor Masyarakat

Dalam penegakan hukum masyarakat juga memiliki peran mematuhi segala peraturan yang sudah ada. Tentu hal ini menjadi

²⁵ *ibid*

²⁶ *ibid*

kendala penegakan hukum dalam upaya menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁷

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan yaitu sikap manusia terkait apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Sikap ini menjadi penentu berjalannya penegak hukum dalam masyarakat. Supaya masyarakat sadar hukum terhadap berbagai peraturan yang ada dan mau menjalankan apa yang menjadi larangannya.²⁸

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁹

c). Efektivitas Menurut M. Lawrence Friedman

Teori sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa, *“the “legal system” would be nothing more than all these subsystem put together”*.³⁰ artinya dalam sistem hukum terdapat subsistem-subsistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi. ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

- 1 Struktur Hukum (***Legal Structure***) yaitu terdiri dari lembaga hukum seperti kepolisian, pengacara, jaksa dan

²⁷ *ibid*

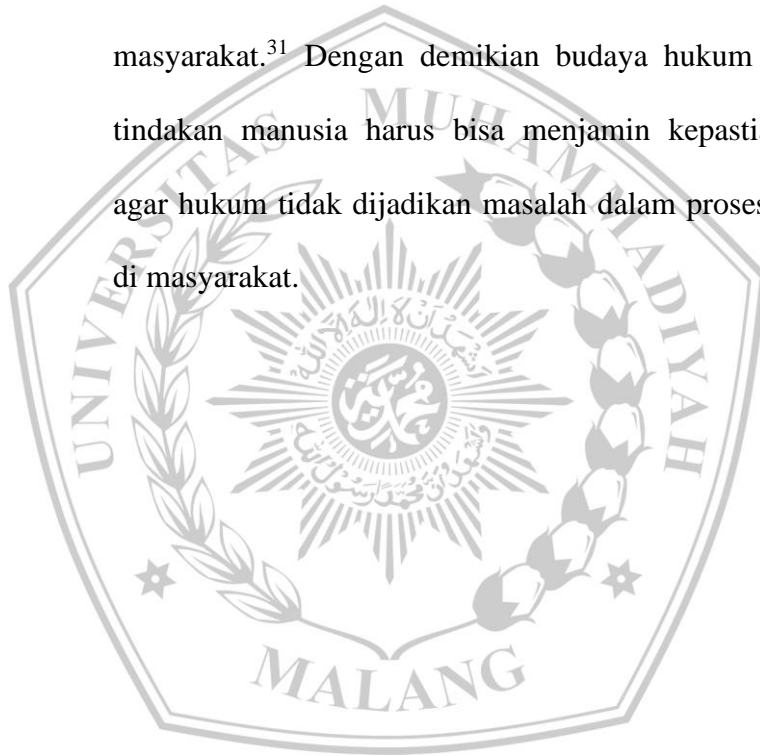
²⁸ *ibid*

²⁹ *ibid*

³⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Fundation, New York, 1975, Hal. 10.

hakim dengan tugas memberi pelayanan penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2 Isi Hukum (***Legal Substance***) yaitu pemikiran penegak hukum bertindak harus berdasarkan produk hukum yang di buat serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 3 Budaya Hukum (***Legal Culture***) yaitu perilaku manusia mendukung sistem hukum agar berjalan secara baik di masyarakat.³¹ Dengan demikian budaya hukum merupakan tindakan manusia harus bisa menjamin kepastian Hukum, agar hukum tidak dijadikan masalah dalam proses penerapan di masyarakat.



³¹ *ibid*